



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP NUSA TENGGARA

Jalan Jenderal Sudirman No. 36 Rembiga Mataram 83124
Telepon (0370)647862; Faksimile (0370)647883
Situs www.pajak.go.id; Layanan Informasi dan Keluhan Kring Pajak (021)1500200
Email pengaduan@pajak.go.id

SIARAN PERS

Nomor : 005 / 2018
Tanggal : 25 Juni 2018

Pemerintah Turunkan Tarif Pajak Penghasilan Final Bagi UMKM menjadi 0,5%

Pemerintah telah menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Final (PPh Final) menjadi 0,5% bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018.

Peluncuran PPh Final 0,5% bagi UMKM ini dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo di Jatim Expo, Surabaya, pada Jumat 22 Juni 2018 dan dilanjutkan dengan sosialisasi kepada lebih dari 1.000 peserta pelaku UMKM di wilayah Bali pada Sabtu 23 Juni 2018.

Pokok-pokok perubahan yang diatur dalam PP 23 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Penurunan tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang wajib dibayarkan setiap bulannya;
2. Wajib Pajak dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau tarif PPh Final 0,5% berdasarkan PP 23 Tahun 2018;
3. Mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% sebagai berikut:
 - a. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu selama 7 tahun;
 - b. Untuk Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer atau Firma selama 4 tahun;
 - c. Untuk Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas selama 3 tahun.

Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mendorong pelaku UMKM agar lebih ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam pembayaran pajak dan pengenaan pajak yang lebih berkeadilan, serta meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia. Dengan pemberlakuan PP ini diharapkan:

- a. Pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi;
- b. Pelaku UMKM semakin berperan dalam menggerakkan roda ekonomi untuk memperkuat ekonomi formal dan memperluas kesempatan untuk memperoleh akses terhadap dukungan finansial;

- c. Memberikan waktu bagi pelaku UMKM untuk mempersiapkan diri sebelum Wajib Pajak tersebut melaksanakan hak dan kewajiban pajak secara umum sesuai ketentuan UU Pajak Penghasilan.

Demikian disampaikan semoga memberikan kejelasan bagi seluruh masyarakat. Bagi masyarakat/Wajib Pajak yang membutuhkan informasi lebih lanjut seputar perpajakan dan berbagai program dan layanan yang disediakan Ditjen Pajak dapat dilihat pada www.pajak.go.id atau hubungi Kring Pajak di 1500 200. .#PajakKitaUntukKita

Kepala Kantor

ttd

Suparno
NIP 19680520 199503 1 003